Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

Tamsir^{1*}, Ng Syamsiah. B²

^{1,2} Universitas Ichsan Gorontalo

Abstrak

Tujuan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Hasil olahan data, dengan menggunakan SPSS-16 dapat diperoleh nilai thitung sebesar 2,579. artinya bahwa variabel transparansi (b1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Sedangkan variabel partisipasi masyarakat (b2) berpengaruh negatif. F hitung sebesar 3,418 > sig. sebesar 0,048 yang artinya hubungan antara transparansi (b1) dan partisipasi masyarakat (b2) terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebesar 3,418 adalah signifikan.

Kata Kunci: *Transparansi, Partisipasi masyarakat, Pertanggungjawaban.*

Copyright (c) 2022 Tamsir

✉ Corresponding author :

Email Address : ekamerdekawati880817@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu peran dana desa adalah sebagai alat dalam membantu terlaksananya pembangunan di desa, pemberdayaan masyarakat dan berjalannya pemerintahan desa dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat (Kartika, 20212). Diharapkan pula dapat membantu masyarakat dalam hal kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat membantu mengembangkan potensi perekonomian lokal yang ada di desa tersebut (Syamsiah & Mansur, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, 10% dana desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh langsung oleh desa tanpa melalui perantara (Tahir dkk, 2020). Walaupun dalam kenyataannya dana desa tersebut pnyalurannya melalui Kabupaten/Kota dalam bentuk pengawasan. Sedangkan jumlah anggaran untuk tiap-tiap desa berbeda-beda (Tamsir, 2020).

Desa juga memperoleh aliran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk bantuan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah ke pemerintah desa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat desa (Karim, 2019). Anggaran Dana Desa sebaga subtansi yang baru dalam Anggaran Pendapatan dan belanja desa dalam mendukung pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat dan publik. Adapun besaran alokasi dana desa tersebut sebanyak 30% ke pemerintah desa

serta 70% diperuntukkan dalam program pemberdayaan masyarakat dan publik (BI, 1998).

Penggunaan ADD pada Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato difungsikan sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk terjaminnya seluruh rangkaian program kegiatan masyarakat dalam pengelolaan ADD maka manajemen pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sesuai anggaran telah ditetapkan (Ahmad dkk, 2022). Dana desa sebagian besar diperuntukkan untuk infrastruktur desa baik itu berupa pembangunan desa, dan karena itu ADD tiap tahun selalu ditingkatkan (Karim dkk, 2021). Harapan pemerintah pusat masyarakat desa dapat dapat merasakan perkembangan pernghasilan melalui kerja keras yang dilaksanakan di desa (Muslimin & Sulfianty, 2022). Sebab itu prtisipasi masyarakat diperlukan dan transparansi untuk menggunakan ADD dengan tujuan mengelolah dengan baik anggaran tersebut dengan sebaik baiknya (Fairuza & Syamsiah, 2021). Dalam perkembangan pembagunan maupun pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat desa (Karim dkk, 2022).

Tapi dalam prakteknya, masi sering terdapat masalah di setiap wilayah/desa iayalah ADD dalam pembiayaan belanja desa berkontribusi besar daripada PAD dari pada belanja desa (Syamsiah & Sari, 2020). Masalah tersebut terjadi dikarenakan ADD lebih besar dari pada Pendapatan Asli Desa (PAD). Berdasarkan fenomena yang ada bahwa sebagian besar masyarakat desa di desa Botubilotahu adalah masyarakat yang masih membutuhkan atau bergantung pada dana desa yang baik, untuk itu dalam pengelolaan Alikasi Dana Desa sudah seharusnya mengarah ke pengembangan kesejahteraan hidu masyarakat (Muslimin & Sulfianty, 2020). Dalam mewujudkan harapan tersebut, sudah barang tentu dibutuhkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam hal ini di desa Botubilotahu secara transparan dan diselaraskan dengan perencanaan program kerja pembangunan desa yang memanfaatkan Alokasi dana Desa yang tepat sasaran dan tujuan yang diharapkan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

APBN mengucurkan dana yang ditransfer melalui APBD Kota/Kabupaten dalam tiap tahunnya dan dipertuntukkan bagi desa-desa dalam rangka untuk pembiayaan terlaksananya operasional pemerintah desa berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal desa. Dalam Undang-Undang nomr 23 tahun 2014 ps 294 (3), bahwan ADD dikucurkan dari pusat guna membiayai terlaksananya pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan peraturan-peraturan tentang desa. Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015, ADD merupakan anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan untuk desa dan ditransfer lewat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota/Kabupaten yang difungsikan sebagai pembiayaan terselenggaranya pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan serta pemberdayaan warga desa.

ADD merupakan kewajiban pemerintah dari Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan dana untuk desa yang bersumber dari DBH dan DAU sebagai dana perimbangan (Karim dkk, 2022). Sedangkan DD kewajiban dari pemerintahan pusat dalam mengalokasikan dan mentransferkan ke desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam rangka perwujudan dan penghargaan untuk desa. Dalam tiap tahunnya, Pemerntah pusat menentukan pagu DD dalam belanja transfer untuk daerah serta desa, oleh kelpok belanja negara dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pusat menentukan dan

melakukan perhitungan pagu DD ke setiap Kota/Kabupaten ke seluruh wilayah Indonesia (Syamsiah, 2020). Dalam hasil menghitung dan pembagian tersebut jadi lampran untuk peraturan persediaan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

METODOLOGI

Metode penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran dengan menganalisis data penelitian berupa tabel, grafik yang berfungsi sebagai penjelasan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda untuk memprediksi apakah transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuesioner yang dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS-16. Adapun hasil dari uji analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.730	6.451		1.663	.108
	Transparansi	.717	.278	.444	2.579	.016
	Partisipasi Masyarakat	-.119	.214	-.096	-.557	.582

a. Dependent Variable: Pertanggungjawaban DD

Sumber: Data olahan, 2022.

Dari hasil olahan data SPSS maka diperoleh persamaan regresi berganda $Y = 10,730 + 0,717X_1 + -0,119X_2 + \epsilon$, dimana nilai constant **10,730** yang berarti jika variabel transparansi dan partisipasi masyarakat di asumsikan sama dengan 0, maka pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato adalah sebesar **10,730**. Koefisien variabel transparansi (b_1) sebesar **0,717** yang bermakna bahwa perubahan variabel transparansi (b_1) akan diikuti oleh perubahan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sebesar **0,717** dengan asumsi variabel lain adalah konstan. variabel partisipasi masyarakat (b_2) akan diikuti oleh perubahan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebesar **-0,119** dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

Secara parsial, variabel transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato menggunakan uji t sebagaimana pada tabel dibawah ini, jika dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 adalah :

Tabel 2. Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.730	6.451		1.663	.108
	Transparansi	.717	.278	.444	2.579	.016
	Partisipasi Masyarakat	-.119	.214	-.096	-.557	.582

a. Dependent Variable: Pertanggungjawaban DD

Sumber: Data olahan, 2022.

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,579. Yang berarti bahwa variabel transparansi (b1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato karena diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,016 yang lebih kecil dari taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,05 atau 5% ($0,016 < 0,05$). Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,557. Yang berarti bahwa variabel partisipasi masyarakat (b2) berpengaruh negatif terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Uji simultan atau uji F dilakukan dalam penelitian ini dengan maksud untuk melihat pengaruh variabel motivasi (b1), kepuasan kerja (b2) terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan 30 responden sekaligus sebagai sampel. Dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi dengan taraf $\alpha = 5\%$.

Tabel 3. Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	75.853	2	37.926	3.418	.048 ^a
	Residual	299.614	27	11.097		
	Total	375.467	29			

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Transparansi

b. Dependent Variable: Pertanggungjawaban DD

Sumber: Data olahan, 2022.

Hasil olahan data dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh F hitung sebesar 3,418 > sig. sebesar 0,048 berarti H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya hubungan antara transparansi (b1) dan partisipasi masyarakat (b2) terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebesar 3,418 adalah signifikan. Dalam menentukan besarnya pengaruh variabel transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, maka peneliti gunakan uji koefisien determinasi (R^2) berikut ini.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.449 ^a	.202	.143	3.331

Sumber: Data olahan, 2022.

Olahan data pada program SPSS diperoleh nilai R Square (r^2) sebesar 0,202 atau 20,2%. Yang berarti bahwa variabel transparansi dan partisipasi dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebesar 20,2%. Selain itu koefisien determinasi menjelaskan bahwa jika transparansi dan partisipasi mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebesar 44,9%, sedangkan sisanya sebesar 55,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model.

SIMPULAN

Transparansi berpengaruh positif secara parsial terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Partisipasi masyarakat berpengaruh negatif secara parsial terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Pemerintah Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato agar terus mempertahankan transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa karena diperoleh hasil penelitian bahwa transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Botubilotahu Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Hal ini diperlukan seiring harapan pemerintah pusat agar masyarakat desa dapat merasakan perkembangan pernghasilan melalui kerja keras yang dilaksanakan di desa.

Referensi

- Ahmad, A., Herison, R., Mane, A., Syamsuddin, I., & Karim, A. (2022). Wisata Desa Sapana dalam Peningkatan Ekonomi di Desa Bonto Salama Kabupaten Sinjai. *Celebes Journal of Community Services*, 1(1), 14-21.
- Bank Indonesia. (1998). UU No.10 tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap UU No.7 tahun 1992. Jakarta.

- Fairuza, F., & Syamsiah, N. R. (2021). Evaluasi Desain Mall Pelayanan Publik Kabupaten Sukoharjo dalam Menanggapi Masa New Normal. In *Prosiding (SIAR) Seminar Ilmiah Arsitektur* (pp. 518-524).
- Karim, A. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Nas Media Pustaka, Makassar*.
- Karim, A. A. K., Jumarding, A., & Ahmad, A. (2022). The Role of Zakat in National Economic Transformation through Regional Economic Growth in South Sulawesi Province. *International Journal of Commerce and Finance*, 8(2), 75-98.
- Karim, A., Desi, N., Azis, M., & Daga, R. (2022). Kemandirian BUMDes Upaya Meningkatkan Pades di Desa Pallatikang Kabupaten Jeneponto. *Celebes Journal of Community Services*, 1(1), 1-13.
- Karim, A., Musa, C. I., Sahabuddin, R., & Azis, M. (2021). The Increase of Rural Economy at Baraka Sub-District through Village Funds. *The Winners*, 22(1), 89-95. <https://doi.org/10.21512/tw.v22i1.7013>
- Kartika, R. S. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(3), 179-188. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>
- Muslimin, K., & Sulfianty, S. (2020). Tax Sanctions and Tax Office Services Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha di Kabupaten Pohuwato. *Al-Buhuts*, 16(2), 52-70.
- Muslimin, K., & Sulfianty, S. (2022). Pemeriksaan Manajemen Terhadap Fungsi Keuangan Pada PDAM Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 130-136.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Syamsiah, J., & Mansur, M. (2015). Peningkatan Mutu Pelayanan RSI Unisma Malang melalui Reformasi Manajemen Laundry dan Linen. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 28(2), 148-152.
- Syamsiah, N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Marisa. *Jurnal AkMen*, 17, 501-508.
- Syamsiah, N., & Sari, P. (2020). KONTRIBUSI KOMITMEN ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA APARAT PADA KANTOR CAMAT DI KABUPATEN POHUWATO. *Jurnal Mirai Management*, 5(3), 253-266.
- Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, dan Transparansi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 20-29. <https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203>
- Tamsir, T. (2020). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA PKBM TAMAN PENDIDIKAN DI KELURAHAN TAPA KECAMATAN SIPATANA GORONTALO. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 17(3), 509-517.